

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA
LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) DAN
KINERJA KEUANGAN DAERAH**
(Studi pada 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur Tahun 2012-2016)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Yulia Rani
155020107111015**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2019**

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN (SiLPA) DAN KINERJA KEUANGAN
DAERAH
(Studi pada 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur Tahun 2012-2016)**

Yang disusun oleh :

Nama : Yulia Rani
NIM : 155020107111015
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 18 April 2019.

Malang, 18 April 2019

Dosen Pembimbing,



Dr. Susilo, SE., MS.

NIP. 19601030298611001

**Analisis Faktor yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Kinerja Keuangan Daerah
(Studi pada 38 Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur Tahun 2012-2016)**

Yulia Rani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Email: yuliarani09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komponen APBD berupa pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan sisa belanja modal terhadap Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta hubungannya terhadap opini audit BPK berupa kemampuan mempertahankan WTP sebagai pengukuran kinerja daerah baik secara simultan dan parsial pada tahun 2012-2016. Sampel penelitian adalah sebanyak 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan model fixed effect. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara parsial variabel pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan sisa belanja non moda berpengaruh positif signifikan sedangkan variabel dummy berupa kemampuan mempertahankan WTP berpengaruh negatif signifikan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Kata Kunci : SiLPA, APBD, Pelampauan Pendapatan Daerah, Sisa Belanja Modal, Sisa Belanja non Modal, Kemampuan Mempertahankan WTP, Kinerja Keuangan Daerah.

A. PENDAHULUAN

Transformasi tata Pemerintahan Indonesia dari sentralisasi menuju desentralisasi ditandai dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dilakukan sejak Januari 2001. Dalam perkembangannya, kedua undang-undang tersebut disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang pada saat ini telah disempurnakan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut, menciptakan otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal dimana daerah otonom diberikan dan dilimpahkan wewenang oleh pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah secara mandiri dalam penetapan prioritas pembangunan.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah di era otonomi sekarang ini menjadi sangat penting. Sebagaimana yang disebutkan Mardiasmo (2002) bahwa dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat menggali dan mengelola kekayaan atau sumberdaya daerah dengan efisien dan efektif sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat di daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang timbul sebagai akibat dari adanya otonomi daerah atau desentralisasi fiskal ini, telah termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek perencanaan anggaran merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut dari peraturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab dengan berlandaskan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Sebab, tujuan ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi fiskal ini adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang merata dan memadai dengan cara memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dengan masyarakat lokal (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Dalam pengelolaan keuangan daerah ini juga diikuti dengan konsekuensi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merujuk pada prinsip uang yang mengikuti fungsi *money follow function*, artinya setiap bentuk penyerahan wewenang harus diikuti dengan penyerahan pendanaan untuk melaksanakan kewenangan sesuai dengan fungsi pemerintah yang

menjadi tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan. Selanjutnya, pengelolaan anggaran daerah tersebut terangkum dalam dokumen keuangan yang mengikat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau DPRD yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan sebagai peraturan daerah. Mardiasmo (2012) mendefinisikan bahwa APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat nantu untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Oleh karena itu idealnya di dalam APBD harus mencerminkan kebutuhan masyarakat atau kepentingan publik dengan berbagai potensi dan sumberdaya riil yang dimiliki daerah serta pengeluaran untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Dari tahun ke tahun penetapan alokasi APBD mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan tersebut diasumsikan terjadi peningkatan pula pada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, jika dalam proses pelanggaran dan pelaksanaan APBD tidak berjalan baik dengan kata lain alokasi APBD yang dianggarkan tidak diiringi dengan serapan yang optimal maka kesejahteraan masyarakatpun sulit tercapai. Kondisi APBD Jawa Timur di tahun 2012-2016 meningkat baik dari sisi belanja maupun sisi pendapatan namun realisasi dari pelaksanaan alokasi tersebut terjadi ketidaksesuaian yaitu pada pos pendapatan realisasi melebihi estimasi anggaran dan pada pos belanja realisasi kurang dari alokasi anggaran. Kemunculan ketidaksesuaian tersebut berimbas pada beberapa program pemerintah tidak berjalan dengan optimal yang pada akhirnya terakumulasi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Keberadaan SiLPA pada pengelolaan keuangan daerah harus dihindari karena kontraproduktif dengan proses penganggaran APBD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi SiLPA di Jawa Timur menurut Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, 2018 cukup mengkhawatirkan pasalnya, SiLPA Jawa Timur dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Pada tahun 2016 SiLPA sebesar 1.7 Triliun Rupiah dan kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 2.7 Triliun Rupiah. Tingginya besaran SiLPA tersebut dikhawatirkan menghambat proses pembangunan. Walaupun tidak diketahui secara pasti faktor penyebab terjadinya SiLPA, namun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bali (2013) menyebutkan bahwa keberadaan SiLPA diduga karena beberapa faktor seperti adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran serta adanya realisasi belanja pemerintah daerah yang lebih rendah dari pagu yang dianggarkan. Selain itu beberapa faktor yang terindikasi ikut terlibat dalam pembentukan SiLPA adalah dinilai karena ada efisiensi atau penghematan belanja pemerintah atau karena tidak terlaksananya program/kegiatan sehingga anggaran tidak terserap. Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Kamelia (2017) menenganai faktor yang menyebabkan SiLPA menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan sisa belanja non modal terhadap SiLPA.

Selain itu keberadaan SiLPA juga menjadi dilema bagi pengelolaan keuangan daerah karena besarnya SiLPA bisa mengindikasikan hal yang positif maupun negatif. Menurut Mauli Danayanti (2014) Indikasi SiLPA yang positif berasal dari efisiensi dan efektivitas anggaran sehingga mampu menghasilkan sisa dana bersih, namun SiLPA seperti ini jarang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Indikasi SiLPA yang negatif berasal dari sisa penggunaan anggaran yang tidak disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Hal ini berarti SiLPA yang terbentuk disebabkan oleh ketidakcermatan dalam penyusunan anggaran dan lemah dalam pelaksanaan anggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, SiLPA ini perlu dihindari karena pada dasarnya SiLPA merupakan dana menganggur (*idle fund*), apabila tidak dimanfaatkan secara cermat, tidak akan memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian daerah.

Meskipun keberadaan SiLPA masih bias digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah namun peneliti berusaha menghubungkan hal tersebut dengan penilaian BPK yang digunakan sebagai bentuk pemeriksaan dan penilaian pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Virgasari (2009) menyatakan bahwa opini pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian lain yang meneliti pengaruh opini terhadap kinerja pemerintah daerah juga dilakukan oleh Marfiana (2013) yang

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara opini pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut diperkuat dalam penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, predikat tertinggi opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dihubungkan dengan SiLPA sebagai pengukuran kinerja keuangan daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta saling berkesinambungan sebab, melalui perencanaan akan menghasilkan output berupa penganggaran. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Mardiasmo (2000) bahwa terdapat keterkaitan antara akuntansi sektor public dengan perencanaan dan penganggaran. Penyajian informasi akuntansi diperlukan dalam proses perencanaan keuangan, perhitungan biaya program dan penganggaran.

Sebagai alat perencanaan, anggaran memberikan arahan tentang target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Sedangkan anggaran juga dapat dijadikan sebagai alat pengendalian yang akan menggambarkan bahwa pengalokasian sumber dana masyarakat harus melalui mekanisme persetujuan dari lembaga legislative. Lebih lanjut menurut mardiasmo (2002), bahwa keterkaitan antara manajemen keuangan daerah dan akuntansi sektor publik, utamanya terletak pada: (1). Perencanaan strategik, (2). Pemberian informasi biaya, (3). Penilaian investasi publik, (4). Penganggaran dan (5). Evaluasi kinerja.

b. Anggaran dan Realisasi Anggaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya merupakan implementasi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam bentuk rencana keuangan tahunan daerah yang didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa APBD adalah merupakan Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Realisasi anggaran merupakan istilah lain dari serapan anggaran yang bisa memberikan gambaran jelas mengenai selisih antara rencana atau target anggaran dan pelaksanaan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Realisasi anggaran biasanya disebutkan dalam nominal berupa satuan nilai uang. Realisasi ini bisa bernilai sama dengan target atau bernilai lebih tinggi (positif) dan bernilai lebih rendah (negative) dari target serta keberadaan realisasi sangat bergantung pada prakiraan (*forecasting*) (Mahmudi, 2009).

c. Pengelolaan Sisa Anggaran

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Istilah yang digunakan pada sisa anggaran di akhir periode anggaran adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Mahmudi (2009) mengemukakan bahwa SiLPA merupakan sisa anggaran dan merupakan selisih antara rencana pendapatan dan rencana pengeluaran pada akhir tahun anggaran yang tersaji pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang selanjutnya SiLPA juga digunakan sebagai sisa awal kas ada anggaran berikutnya. SiLPA merupakan selisih dari surplus/defisit dengan pembiayaan netto. SiLPA dapat digunakan sebagai indikator efisiensi pengeluaran pemerintah karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD sekaligus terjadi pembiayaan netto positif, atau pembiayaan netto lebih besar dari defisit APBD.

Dengan adanya surplus anggaran tahun sebelumnya yang menjadi SiLPA, maka defisit APBD di tahun berikutnya bisa tertutupi. SiLPA ini terbentuk dari realisasi perolehan PAD yang melebihi apa yang sudah ditargetkan, adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga anggaran tidak terserap, dan selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan.

2. Pengelolaan Sisa Anggaran

Menurut Mahmudi (2010), sisa anggaran yang berasal dari SiLPA selanjutnya akan digunakan pemerintah daerah sebagai sumber pembiayaan daerah, adapun uraiannya adalah sebagai berikut: (1). Menutup defisit anggaran, (2). Membayar pokok dan cicilan utang, (3). Pembentukan dana cadangan, (4). Penyertaan modal, (5). Pemberian pinjaman. Selanjutnya pengelolaan SiLPA oleh pemerintah daerah ternyata tidak sepenuhnya digunakan semua untuk memenuhi instrument tersebut, bahkan hanya dibiarkan menjadi sis akas di rekening kas daerah dan menjadi dana yang menganggur (idle fund) yang apabila tidak dimanfaatkan secara cermat, tidak akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah (Maui Danayanti, 2014).

Menurut Usman (2012) sisa anggaran diperoleh dari tiga sumber, yaitu: (1). Over estimate pendapatan, terdapat realisasi yang lebih besar dari target selama satu tahun anggaran, (2). Tercipta efisiensi belanja, hal ini disebabkan karena realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja dan (3). SiLPA. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Bali (2013) yang menyebutkan bahwa keberadaan SiLPA diduga karena beberapa faktor seperti adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran serta adanya realisasi belanja pemerintah daerah yang lebih rendah dari pagu yang dianggarkan. Selain itu beberapa faktor yang terindikasi ikut terlibat dalam pembentukan SiLPA adalah dinilai karena ada efisiensi atau penghematan belanja pemerintah atau karena tidak terlaksananya program/kegiatan sehingga anggaran tidak terserap. Senada dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Mely Kamelia (2017) menenganai faktor yang menyebabkan SiLPA menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan sisa belanja non modal terhadap SiLPA.

d. Hubungan Opini BPK dan Kinerja Keuangan Daerah

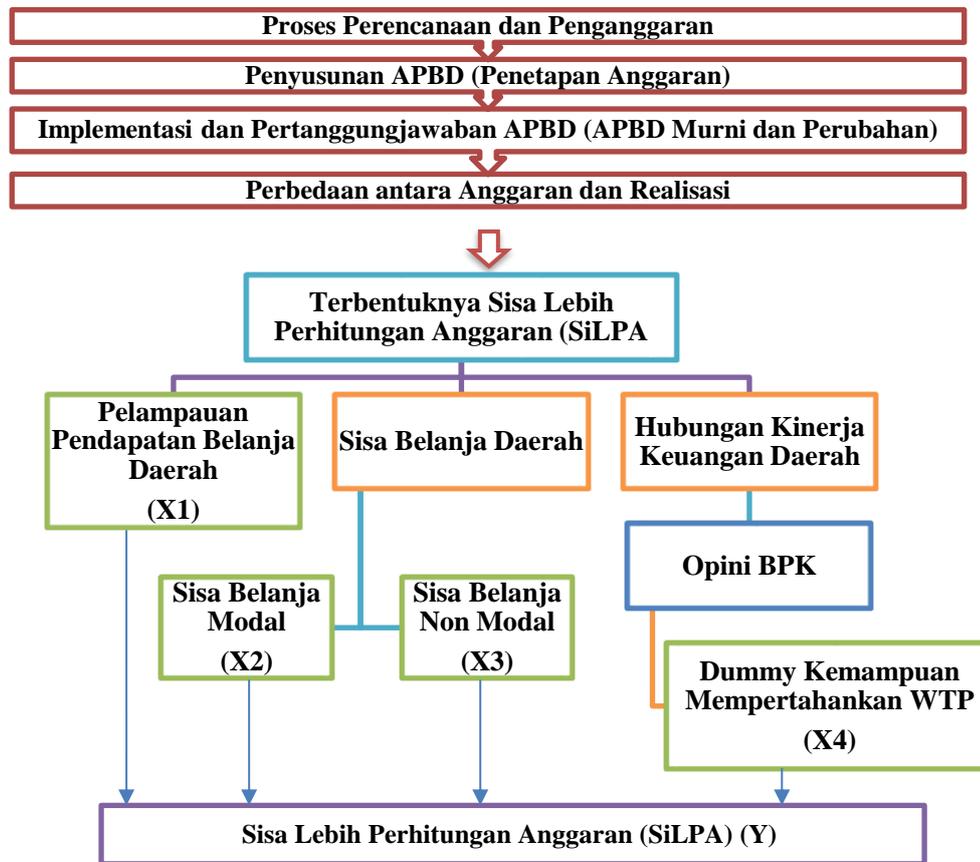
Meskipun keberadaan SiLPA masih bias digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah namun peneliti berusaha menghubungkan hal tersebut dengan penilaian BPK yang digunakan sebagai bentuk pemeriksaan dan penilaian pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, hasil dari pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut, disampaikan melalui ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan secara tahunan yang disampaikan secara semesteran. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), BPK akan memberikan opini atas kinerja dari penilaian LKPD di setiap pemerintah daerah sebab, opini pemeriksaan sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang bersifat eksternal.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan Virgasari (2009) menyatakan bahwa opini pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dimana semakin baik opini yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut. Penelitian lain yang meneliti pengaruh opini terhadap kinerja pemerintah daerah juga dilakukan oleh Marfiana (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara opini pemeriksaan BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut diperkuat dalam penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

C. KERANGKA TEORITIS

Walaupun tidak diketahui secara pasti faktor yang menyebabkan adanya SiLPA namun diduga dari komponen APBD itu sendiri berupa pelampauan pendapatan daerah, belanja modal dan non modal sebagaimana beberapa penelitian sebelumnya yang menekankan pada faktor-faktor penyebab SiLPA yang mengacu pada komponen APBD. Selain itu, jika penelitian sebelumnya menganalisis pengaruh SiLPA terhadap peningkatan belanja modal pada APBD tahun berikutnya, namun penelitian ini justru menganalisis realisasi pendapatan dan realisasi belanja terhadap SiLPA serta hubungannya dengan kinerja keuangan daerah yang berasal dari hasil opini audit BPK berupa kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan predikat WTP sebagai predikat tertinggi

yang dicapai pemertintah daerah. Berdasarkan uraian di atas maka kerangka teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



D. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan APBD dan Realisasi DJPK Kemenkeu RI dan Laporan IHPS BPS RI. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kota/kabupaten se-Jawa Timur yang terdiri 38 kota dan kabupaten (9 kota dan 29 kabupaten). Penulis dalam penelitian mengambil seluruh populasi dikarenakan tersedianya seluruh data. Sementara kriteria penarikan sampel diambil dari Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasinya selama 5 (Lima) tahun, dari tahun 2012 sampai 2016.

Metode Analisis

Analisis regresi merupakan suatu kajian untuk melihat ketergantungan satu variabel terhadap satu atau beberapa variabel lain (variabel explanatori) dengan tujuan untuk membuat estimasi dan/memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel tergantung dalam kaitannya dengan nilai yang sudah diketahui dari variabel explanatorinya (Gujarati dan Porter,2012). Sedangkan data panel merupakan suatu teknik pengumpulan data yang menggunakan penggabungan data runtun waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross section*) (Kuncoro,2011).Model Regresi Panel dari penelitian ini sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 D_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = variabel dependen berupa persentase SiLPA per APBD kota/kabupaten se-Jawa Timur

α = konstanta

$\beta_1 - \beta_n$ = koefisien beta dari variabel independen

X1 = persentase pelampauan pendapatan daerah per per APBD kota/kabupaten se-Jawa Timur

X2 = persentase sisa belanja modal per per APBD kota/kabupaten se-Jawa Timur

X3 = persentase sisa belanja non modal per per APBD kota/kabupaten se-Jawa Timur

D = dummy kemampuan mempertahankan WTP
 t = 1, 2, 3, 4, 5 (data time-series, tahun 2012-2016)
 i = 1, 2, 3, ...,38 (data cross-section kota/kabupaten se-jawa timur)

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

Regresi data panel memiliki 3 pendekatan model yang dapat digunakan. Untuk menentukan model yang tepat digunakan pada penelitian, perlu dilakukan beberapa tahapan uji, yakni uji chow, uji hausman, dan uji langrange multiplier. Program yang digunakan untuk melakukan uji pemilihan model estimasi adalah Stata 13.

Uji Chow

Uji chow dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan antara common effect dan fixed effect. Uji chow memiliki hipotesis sebagai berikut:

H0: Common Effect Model

H1: Fixed Effect Model

Hasil uji chow pada Stata dapat dilihat pada nilai probabilitas alpha di hasil estimasi model fixed effect yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Statistic	d.f	Prob>F
3.24	(37, 148)	0.0000

Sumber: data diolah,2019

Pengujian hipotesis uji chow dilakukan dengan membandingkan nilai P value (Prob>F) dengan tingkat alpha. Berdasarkan tabel tersebut nilai P value (Prob>F) dari uji chow melalui hasil estimasi fixed effect adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari tingkat alpha sebesar 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan menolak H0, sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect*. Untuk meyakinkan bahwa model fixed effect adalah model yang terbaik untuk penelitian perlu dilakukan uji hausman.

Uji Hausman

Uji hausman dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat digunakan antara *random effect* dan *fixed effect*. Uji hausman memiliki hipotesis sebagai berikut:

H₀: Random Effect Model

H₁: Fixed Effect Model

Hasil uji hausman dapat dilihat pada tabel 2. sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Chi2 (4)	Prob>chi2
15.13	0.0044

Sumber: data diolah,2019

Pengujian hipotesis uji hausman dilakukan dengan membandingkan P value (Prob>chi2) dengan alpha. Berdasarkan gambar didapatkan nilai P value (Prob>chi2) sebesar 0.0044 artinya lebih kecil dari tingkat alpha sebesar 0,05 ($0.0044 < 0,05$) dan menolak H₀. Sehingga model yang tepat digunakan adalah *fixed effect*. Karena hasil uji chow dan uji hausman sama atau menunjukkan pemilihan model dengan *fixed effect* maka tidak perlu dilakukan uji Langrange Multiplier.

Hasil Analisis Regresi

Pengujian analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan program stata 13 untuk melihat pengaruh antara variabel independen yakni pelampauan pendapatan daerah (x1), sisa belanja modal (x2), sisa belanja non modal (x3) dan dummy mempertahankan WTP (D) terhadap variabel dependen yaitu harga SiLPA Setelah mendapatkan hasil metode yang terbaik untuk digunakan dalam model yaitu dengan menggunakan *fixed effect*, maka dilanjutkan dengan mengestimasi regresi panel yang tepat. Hasil estimasi dari *fixed effect* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Panel

Variabel Independen	Variabel Dependen (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA))		
	Coefficient	Prob (t-statistik)	Keterangan
A	5.491115	0.000	Signifikan
X1	0.5527464	0.000	Signifikan
X2	0.3964902	0.000	Signifikan
X3	0.639186	0.000	Signifikan
D	-1.998678	0.000	Signifikan
R-squared			0.6637
Prob (F-statistik)			0.0000

Sumber : Data Diolah Stata, 2019

Dari hasil regresi diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 5.491115 + 0.5527464 X1_{it} + 0.3964902 X2_{it} + 0.639186 X3_{it} - 1.998678 D_{it} + e_{it}$$

Variabel independen pelampauan pendapatan daerah (x1), sisa belanja modal (x2) dan sisa belanja non modal (x3) memiliki hubungan yang positif terhadap SiLPA, sehingga x1, x2 dan x3 naik maka harga SiLPA akan ikut naik. Sebaliknya, variabel dummy berupa kemampuan mempertahankan WTP (D), hubungan negatif artinya SiLPA akan berkurang pada daerah yang mampu mempertahankan WTP dibandingkan dengan daerah yang tidak mampu mempertahankan WTP, begitupun sebaliknya

Uji Hipotesis

Secara umum, model ini cukup kuat menjelaskan variabel dependen (SiLPA) sesuai dengan hasil estimasi pada tabel 4.9. Dalam hal ini dikarenakan nilai R-squared yang hanya mencapai 0.6637 atau sebesar 66.37 persen. Nilai R-squared yang diperoleh menjelaskan bahwa variasi dari variabel bebas (pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal, sisa belanja non modal dan opini audit BPK) mampu mempengaruhi variasi variabel terikat (SiLPA) sebesar 66.37 persen, sedangkan sisanya tidak dijelaskan dalam model.

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan ukuran 5%. Hasil pengujian dengan menggunakan Fixed Effect Model dari keseluruhan variabel bebas terikat menunjukkan hasil yang signifikan. Artinya, secara simultan variabel bebas dalam model ini berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai probabilitas f-statistiknya yang dibawah 5 persen atau sebesar 0.000.

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari masing-masing variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat pada model dengan menggunakan uji t, dimana hipotesis nol ($H_0: \beta = 0$) artinya nilai koefisien sama dengan nol, sedangkan hipotesis alternatif ($H_1: \beta \neq 0$) artinya nilai koefisien berbeda dengan nol. Signifikansi ini secara langsung dapat dilihat dari besarnya angka probabilitas. Jika p-value (t-stat) lebih kecil dari α ($\alpha = 5\%$ atau 0,05) maka variabel bebas tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya atau tolak H_0 . Selain menguji signifikansi dengan p-value (t-stat) dengan α sebesar 5%, juga dilakukan uji arah atas nilai koefisiennya. Dari hasil pengujian regresi atas model penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas berupa X1 (Pelampauan Pendapatan Daerah), X2 (Sisa Belanja Modal, X3 (Sisa Belanja Non Modal) dan D (Opini audit BPK berupa dummy variabel) adalah signifikan karena bernilai kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.

b. Pembahasan

Pengaruh Pelampauan Pendapatan Daerah terhadap SiLPA

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan signifikan dan positif antara pelampauan pendapatan daerah terhadap SiLPA. Hasil uji hipotesis menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara variabel ini dengan SiLPA. Dengan demikian, hipotesis tersebut diterima dapat diartikan bahwa pelampauan pendapatan daerah mempengaruhi adanya SiLPA dengan penjelasan semakin besarnya pelampauan pendapatan daerah yang dicapai oleh pemerintah daerah akan menyebabkan peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di kabupaten kota di Jawa Timur. Hal ini selaras dengan penelitian Kamelia (2017) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SiLPA dan Strategi untuk Meminimalisirnya pada APBD Kabupaten Bogor bahwa variabel pelampauan pendapatan daerah di penelitian tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap adanya SiLPA di Kabupaten Bogor dengan nilai koefisien sebesar 0,916. Selain itu, dalam penelitian Bali (2013) juga menyebutkan bahwa keberadaan SiLPA diduga karena beberapa faktor seperti adanya pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran.

Sesuai penjelasan diatas, terdapat hubungan positif dari adanya pelampauan pendapatan daerah dengan SiLPA, maka hal tersebut harus diantisipasi. Sebab hal ini jika dibiarkan akan meningkatkan adanya SiLPA yang dianggap tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Menelaah penjelasan sebelumnya mengenai sinkronisasi dan keterkaitan antara perencanaan dan realisasi anggaran maka dalam hal ini pun juga perlu diimplementasikan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Dengan perencanaan target pendapatan daerah yang tidak baik seperti perencanaan target pencapaian pendapatan yang tidak sesuai dengan potensi sebenarnya atau under estimate hal ini akan menciptakan selisih lebih pada realisasi pencapaian pendapatan. Jika hal ini tidak mampu dimanfaatkan secara baik dalam alokasi belanja daerah, maka hal ini akan terakumulasi menjadi SiLPA.

Pengaruh Sisa Belanja Modal terhadap SiLPA

Hipotesis kedua adalah terdapat hubungan signifikan dan positif antara Sisa Belanja Modal terhadap SiLPA. Hasil uji hipotesis pada variabel ini, nilai probabilitas t-statistik sebesar 0.000 atau 0%. Dimana nilai ini kurang dari batas standar deviasi (tingkat kesalahan) 5 persen. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sisa belanja modal mempengaruhi SiLPA secara positif signifikan. Hal ini berarti bahwa adanya peningkatan sisa belanja modal akan menyebabkan peningkatan SiLPA di Kabupaten kota Jawa Timur. Hal ini selaras dengan penelitian Kamelia (2017) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SiLPA dan Strategi untuk Meminimalisirnya pada APBD Kabupaten Bogor bahwa variabel sisa belanja modal di penelitian tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap adanya SiLPA di Kabupaten Bogor dengan nilai koefisien sebesar 0,971.

Adanya sisa belanja modal yang merupakan bagian dari sisa belanja daerah ini berhubungan positif dengan SiLPA, sebagaimana penjelasan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Daerah yang bersumber dari SiLPA tahun 2013 menyimpulkan bahwa peningkatan besaran SiLPA salah satunya disebabkan belanja yang tidak terserap lebih dominan dibanding dengan pelampauan pendapatannya. Dari hasil koefisien semua variabel bebas dari tabel 3, variabel sisa belanja modal tidak menjadi faktor terbesar atau dominan dalam penelitian penyumbang pembentuk SiLPA yaitu menjadi posisi ketiga pengaruhnya terhadap SiLPA setelah sisa belanja non modal dan pelampauan pendapatan daerah. Namun, sisa belanja modal yang harus diminimalisir karena berkaitan dengan pelayanan publik ke masyarakat

Pengaruh Sisa Belanja Non Modal terhadap SiLPA

Hipotesis ketiga adalah adanya hubungan positif signifikan antara sisa belanja non modal terhadap SiLPA. Hasil uji hipotesis pada variabel ini menunjukkan hasil positif signifikan sehingga menolak H₀. Dengan demikian peningkatan sisa belanja non modal akan menyebabkan peningkatan SiLPA di Kabupaten kota Jawa Timur. Hal ini selaras dengan penelitian Kamelia (2017) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi SiLPA dan Strategi untuk Meminimalisirnya pada APBD Kabupaten Bogor bahwa variabel sisa belanja modal di penelitian tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap adanya SiLPA di Kabupaten Bogor. Adanya sisa belanja non modal yang tinggi dan menjadi faktor pertama penyumbang SiLPA di kabupaten dan kota di Jawa Timur ini tak lain disebabkan karena sisi regulasi pada ketentuan akses gaji yang menjadi bagian dari belanja non modal. Hal tersebut juga didukung dalam penelitian Usman (2012) tentang Analisis Proses dan Pola Terbentuknya SiLPA di Kabupaten Sumbawa yang menyebutkan bahwa pada sisi regulasi yaitu berupa ketentuan akses gaji sebesar 12.5% akan meningkatkan adanya SiLPA.

Hubungan Opini BPK berupa Kemampuan Mempertahankan WTP terhadap SiLPA

Hipotesis terakhir yaitu kemampuan mempertahankan WTP berpengaruh signifikan dan negatif terhadap SiLPA. Pada uji kali hipotesis variabel dummy ini dugaan sesuai dengan hasil uji bahwa nilai variabel tersebut signifikan dan mempunyai arah negatif. Dengan demikian dapat diartikan bahwa daerah yang mampu mempertahankan WTP dengan nilai dummy sama dengan 1 ($D=1$) memiliki SiLPA yang lebih sedikit daripada daerah yang tidak mampu mempertahankan WTP ($D=0$). Hubungan yang negatif dari daerah yang mampu mempertahankan WTP dengan SiLPA ini tak lain disebabkan karena WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam opini audit BPK merupakan predikat tertinggi yang dicapai suatu daerah pada pengelolaan keuangan daerah karena memenuhi kriteria standar akuntansi pemerintah, kepatuhan peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan dan efektivitas. Sehingga, SiLPA yang dinilai tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah ini kontras dengan WTP. Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan Vigarari (2009) tentang Hubungan Antara Opini Auditor pada LKPD, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Kinerja Keuangan Daerah bahwa jika opini yang diperoleh pemerintah semakin baik maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah tersebut.

Oleh karena itu, keraguan dan bias dari SiLPA yang tidak bisa digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan daerah atas penelitiannya Mauli Danayanti (2014) tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Realisasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi bahwa adanya SiLPA ini bisa bernilai positif dan negatif terhadap kinerja keuangan daerah dapat dibenarkan sebab memang benar bahwa pemerintah daerah di Indonesia termasuk kabupaten dan kota di Jawa Timur belum mampu menghasilkan SiLPA yang positif berasal dari efisiensi dan efektivitas anggaran yang mampu menghasilkan sisa dana bersih, namun lebih cenderung kepada pembentukan SiLPA yang negatif berasal dari sisa penggunaan anggaran yang tidak disebabkan oleh efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

F. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka disimpulkan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Komponen dalam APBD yang menjadi penyebab adanya SiLPA adalah komponen pendapatan daerah berupa pelampauan target pendapatan daerah, komponen belanja daerah berupa sisa belanja daerah baik belanja modal maupun non modal
2. Pelampauan pendapatan daerah dalam penelitian ini merupakan capaian realisasi atas target pendapatan daerah. Variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap adanya SiLPA di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sisa belanja daerah berupa sisa belanja modal merupakan sisa dana alokasi belanja modal yang tidak terserap pada realisasi belanja modal. Variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap adanya SiLPA di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sisa belanja daerah berupa sisa belanja non modal merupakan sisa dana alokasi belanja non modal baik dari belanja langsung maupun tidak langsung yang tidak terserap pada realisasi belanja non modal. Variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap adanya SiLPA di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dari ketiga variabel komponen APBD (pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan sisa belanja non modal) variabel belanja modal memiliki pengaruh yang paling tinggi dalam unsur pembentukan SiLPA di kabupaten kota di Jawa Timur, selanjutnya variabel pelampauan pendapatan daerah dan yang terakhir sisa belanja modal.
3. Pada daerah yang mampu mempertahankan WTP memiliki SiLPA yang lebih sedikit daripada daerah yang tidak mampu mempertahankan WTP. Sehingga, SiLPA berhubungan negatif dengan kemampuan mempertahankan WTP dengan kata lain SiLPA merupakan indikasi negatif dalam pengelolaan keuangan daerah karena bukan merupakan hasil dari efisiensi atau dana bersih.

Saran

Saran dari hasil penelitian ini, didapatkan beberapa saran yang dapat diberikan untuk pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Komponen dalam APBD yang menyebabkan adanya SiLPA seperti pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan non modal perlu dikaji ulang oleh pemerintah daerah terkait pagu anggaran yang ditetapkan pada proses penganggaran, bahwa pada penetapan estimasi pendapatan daerah harus disesuaikan dengan potensi yang ada agar tidak terjadi under estimate pendapatan. Sedangkan pagu pada belanja modal perlu ditingkatkan karena menjadi unsur pembentuk terendah dalam SiLPA dan juga pada peninjauan pagu belanja non modal mengenai kebijakan seperti dana cadangan dan akses gaji pegawai karena pada belanja non modal ini menjadi faktor tertinggi dalam unsur pembentuk SiLPA.
2. Melihat fakta bahwa variabel dalam penelitian ini yang menjadi komponen dalam APBD yaitu pelampauan pendapatan daerah, sisa belanja modal dan non modal memiliki pengaruh positif terhadap SiLPA maka sebaiknya pemerintah daerah meminimalisir hal tersebut yaitu dengan meningkatkan kemampuan pengelolaan APBD yang menjadi penyebab SiLPA tersebut yang selanjutnya digunakan untuk membiayai belanja daerah dan mengoptimalkan segala bentuk kegiatan maupun program dari belanja modal dan non modal sehingga tidak menyebabkan SiLPA di akhir tahun anggaran.
3. Sebaiknya bagi pemerintah daerah yang belum mampu mempertahankan predikat tertinggi opini BPK dalam pengelolaan keuangan daerah berupa predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), mengusahakan mengejar ketertinggalan tersebut dengan melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kriteria value for money (ekonomis, efisien dan efektif) sesuai penilaian audit BPK dalam menjalankan segala program dan kegiatan sehingga hal tersebut akan meminimalisir adanya SiLPA di akhir tahun anggaran mengingat dalam penelitian ini terdapat hubungan negatif antara SiLPA dengan kemampuan mempertahankan WTP.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali, Thomas Tuba. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya SiLPA Tahun 2010 Ditinjau dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah*. Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Danayanti, Mauli. 2014. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Khusus (Dak) Dan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Realisasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi*. Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Gujarati, Damodar N. dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kamelia, Mely. 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dan Strategi Untuk Meminimalisirnya Pada Apbd Kabupaten Bogor*. Thesis. Institut Pertanian Bogor.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Kusnandar dan Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga: Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andy: Yogyakarta
- Mardiasmo. 2012. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Marfiana, Nandhya., L Kurniasih. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten*. Jurnal Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Masdiyanti, Erawati. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2. ISSN: 2302-8556
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Usman. 2012. *Analisis Proses dan Pola Terbentuknya SiLPA di Kabupaten Sumbawa*. Tesis Magister Ilmu Ekonomi. Malang: Universitas Brawijaya (tidak dipublikasikan)
- Virgasari, Aviva (2009). Hubungan Antara Opini Auditor pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Kinerja Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang.